

DAFTAR PUSTAKA

Ardila, J. 2013. Upaya Penanggulangan Prostitusi : (Studi di Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Politik*. 2(3), 1-19

Aini, S.N. 2009. Analisis terhadap Peran Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004 – 2009. *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang*. 1-102

Akbar. 2017. Peran Sekretariat Dewan dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 5 (3), 1181-1190

Annisa, D.S. 2016. Presentasi Diri Pekerja Seks Komersial Emporium Jakarta. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan AGUNG Tirtayasa*, 1-102.

Ardila, J. 2015. Upaya Penanggulangan Prostitusi (Studi di Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Fakultas Hukum USU*. 3(2), 21-32.

Arianto, M. 2012. Pola Jaringan Prostitusi Mahasiswa di Kecamatan Padang Barat, *Jurnal Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 1-10

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.

Aryani, D. 2015. Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual pada Wanita Pekerja Seksual Kabupaten Tegal. *Jurnal Kemas*, 10(2), 160-168.

Badrus, M. 2013. Faktor –faktor Pribadi yang Mempengaruhi Perilaku Manusia. *Jurnal Komunikasi Pendidikan IAIT Kediri*. 3(2), 13-24

Dewandaru. 2016. Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. *Diponegoro Law Journal*. 5(3), 1-25

Dewi, R. 2014. Fungsi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1-26.

DPRD Kota Padang, *Profil Kinerja DPRD Kota Padang tahun 2017*. Sumatera Barat.

Handoko, V.S. 2011. Pengelolaan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan Pekerja Seks Komersial dari Perspektif Sosiologi di Pantai batu Putih, Gunung Kidul, Yogyakarta, *Jurnal FISIP Universitas Atma Jaya*, 7-8

Harahap, I.D. 2008. Tinjauan Peluang Perempuan dalam Politik Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 dan UU No. 10 tahun 2008. *Skripsi Fisip USU*, Medan, 1-99.

Hariyati. 2014. *Upaya-upaya Pencegahan dan Pola Pencarian Pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) Perempuan Pekerja Seks di Tempat Prostitusi Bandang Raya Kota Samarinda*. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, KALTIM.

Hastono, S. P & Sabri, L. 2011. *Statistik Kesehatan*. Edisi I. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Havocscope. 2017. *Briefing Book on Prostitution*. Global Black Market Information. Amazon

Hutami, G.2010. Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Diponegoro*.

JPNN.Com. 2018. Di Padang, Maraknya PSK Resahkan Masyarakat. Sumbar. <https://www.jpnn.com/news/di-padang-maraknya-psk-resahkan-warga>. Diakses 1 Mei 2018.

Jajuli, 2010. Motivasi dan Dampak Psikologis Pekerja Seks Komersial. *Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1-92.

Kristianti. S. 2015. Dukungan Wanita Pekerja Seks dan Teman Pelanggan terhadap Penggunaan Kondom. *Jurnal STIKES*, 5(1), 144-154.

Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Universitas Nusantara PGRI. Kediri.

Manurung, M. 2014. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi. *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta*. 1(3), 23-35

Martono, N. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Munawaroh, S. 2010. Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *Dimensia*, 4(2), 69-82.

Naharuddin, A. 2015. Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Makassar dalam Merespon Kepentingan Perempuan di Kota Makasar. 1-75.

Nazriyah, R. 2017. Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 47(1), 39-60

Nimrah, S. & Sakaria. 2015. **Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif)**. *Jurnal The Politics*, 1(2), 173-182.

Padangkita.com. 2017. Catatan Satpol PP Kota Padang tentang Jumlah PSK yang Terjaring Razia 2017. Sumbar. <http://padangkita.com/psk-di-kota-padang-meningkat-di-2017/>. Diakses 1 Mei 2018.

Pambudi, M.Y. 2014. Perempuan dan Politik Studi Tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang. *Jurnal Perempuan* ed. 34

Pardede, R.C. 2008. Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi : Wilayah Hukum Polsek Balige). *Skripsi Fakultas Hukum USU*. 1-98.

Pasaribu, S.S. 2009. Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengawasan Implementasi Perda No. 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat daerah Sumatera Utara). *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik USU*, 1-71

Pemerintah Kota Padang. 2005. *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*. Sumatera Barat

Pemerintah Kota Padang. 2007. *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 tahun 2007 tentang Perubahan atas PERDA Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*. Sumatera Barat

Pemerintah Kota Probolinggo. 2006. *Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 tahun 2006 tentang penanggulangan pekerja seks komersial (PSK)*. Probolinggo

Presiden RI. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta.

Presiden RI. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta

Presiden RI. 2015. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta

Purnamawati. 2013. Perilaku Pencegahan Penyakit Menular Seksual di Kalangan Wanita Pekerja Seksual Langsung. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7 (11), 514-521

Randi, DKK. 2017. Wawancara dengan Warga Masyarakat Kota Padang. Sumatera Barat.

Regar, P.M. 2016. Pengetahuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Mencegah Penyakit Kelamin di Kota Manado. *Jurnal Holistik*, 9(7), 1-20.

Republika. 2011. Prostitusi Terselubung Menjamur. Kabar Jabodetabek. Jakarta

Risnawati. 2016. Peran Ganda Istri yang Bekerja dalam Membantu Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit pada PT. Bumi Mas Agro di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*. 4(3), 84-97

Roem, E.R. 2014. Strategi Komunikasi Perempuan Seks Komersial Melalui Taksi Gelap di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 5(2).

Rusdiana. 2014. Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial Lokalisasi Bandang Raya dengan Masyarakat Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Sosiatri*, 3(21), 1-17.

Sanyoto. 2008. Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. 8(3), 199-204

Sari, B.W.N. & Suwartiningsih, S. 2013. Pemberdayaan Perempuan dalam Penanggulangan HIV/AIDS. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 22(2), 118-135.

SATPOL PP. 2017. *Rekapitulasi Kegiatan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang*. Sumatera Barat.

Sekretariat DPRD Kota Padang. 2017. Hasil Pemilu Legislatif Anggota DPRD Kota Padang Periode 2014-2019. Sumatera Barat.

Sekretariat DPRD Kota Padang. 2017. Identitas, Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman di DPRD. Sumatera Barat.

Setyawan, F.A. 2009. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 1-19

Solihah, R. 2016. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014 : Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 291-307.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.

Suprojo. 2016. Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*. 4(2), 12-34

Wiriadinanta, W. 2015. Peranan Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 44(2), 209-228

